

SINOPSIS

Latar belakang penelitian ini adalah melihat bahwa neoliberalisme saat ini menempati posisi strategis dalam perkembangan politik negara Indonesia. Jejak neoliberalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru hingga sekarang ini. Hampir semua kebijakan yang dibuat berlandaskan pada paham neoliberalisme. Padahal bisa dipahami, neoliberalisme saat ini sangat berdampak buruk bagi perkembangan suatu negara. Di Indonesia, hanya sebagian kecil elemen rakyat yang berani melakukan kritik terhadap praktek neoliberalisme di Indonesia. Oleh karenanya peneliti berusaha melihat lebih jauh persepsi politik Muhammadiyah terhadap Neoliberalisme pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui secara mendalam mengenai persepsi politik Muhammadiyah terhadap neoliberalisme pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sumber-sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa interview atau wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara menulis ataupun mengetik data yang diperoleh dari lapangan dengan rapi, terperinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Setelah reduksi data akan dilakukan display data dimana data yang telah direduksi disajikan untuk membantu dalam penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa secara rinci Muhammadiyah sangat tanggap dalam merespon semua kebijakan yang berkaitan dengan neoliberalisme. Muhammadiyah bisa mendapatkan informasi dengan mudah baik dari media cetak maupun media elektronik. maka cara pengaturan arus informasi terkait neoliberalisme dengan mengkomunikasikan berbagai persoalan neoliberalisme kepada jaringan organisasi Muhammadiyah sampai tingkat bawah, kemudian Muhammadiyah mencoba membandingkan dengan kondisi keindonesiaan saat ini, ternyata jauh berbeda, pengharapan Indonesia ke depan adalah Ekonomi kerakyatan. Muhammadiyah beranggapan KIB Jilid II itu menerapkan paham neoliberalisme, perilakunya dan faktanya jelas, dan secara tegas rezim KIB dalam dua periode ini lebih merepresentasikan rezim yang neoliberalisme dan sangat tampak sekali.

Kesimpulan yang diambil peneliti adalah Muhammadiyah menganggap neoliberalisme adalah sistem yang berdampak buruk jika suatu negara menerapkan hal tersebut karena bertentangan dengan ekonomi kerakyatan dalam UUD. Adapun sarannya adalah Muhammadiyah seharusnya bisa bersosialisasi melakukan tuntutan akan kembalinya fungsi negara dan masuk kedalam pejabat publik negara sehingga mampu merubah kebijakan yang berinti neoliberalisme.